



Masjid, Makam, Dan Kekuasaan Studi Arkeologi Tentang Otoritas Politik Dan Keagamaan Islam

Imam Samtama Harahap¹, Muhammad Khoirul Anwar Lubis², Muhammad Abdillah³, Fahmi Anugrah⁴

Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Keywords:

Arkeologi Islam; Masjid; Makam; Kekuasaan

Author's email:

imamsamtama1@gmail.com,
anwarlubisr76@gmail.com,
abdillah12is3@gmail.com,
fahmianugrah237@gmail.com

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran masjid dan makam sebagai tinggalan arkeologis Islam dalam merepresentasikan hubungan antara otoritas keagamaan dan kekuasaan politik. Penelitian menggunakan metode sejarah dengan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui studi pustaka dan analisis kontekstual. Hasil kajian menunjukkan bahwa masjid berfungsi sebagai pusat ibadah, sosial, dan legitimasi kekuasaan, sedangkan makam menjadi simbol legitimasi spiritual melalui bentuk fisik dan praktik ziarah. Kesimpulannya, masjid dan makam merepresentasikan integrasi agama dan kekuasaan dalam sejarah Islam di Nusantara.

PENDAHULUAN

Arkeologi Islam merupakan cabang kajian arkeologi yang berfokus pada tinggalan material masyarakat Muslim masa lalu, seperti bangunan, artefak, dan lanskap budaya, yang berkaitan dengan praktik keagamaan, sosial, dan politik. Kajian ini tidak hanya menekankan identifikasi bentuk fisik peninggalan Islam, tetapi juga penafsiran makna dan fungsi sosialnya dalam konteks sejarah. Dalam kerangka tersebut, masjid dan makam menempati posisi penting sebagai tinggalan arkeologis yang merepresentasikan dinamika kehidupan religius sekaligus relasi kekuasaan dalam masyarakat Islam.

Masjid pada masa Islam klasik dan pertengahan tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat aktivitas sosial, pendidikan, dan pemerintahan yang berkaitan erat dengan otoritas politik penguasa. Pembangunan masjid oleh penguasa berfungsi sebagai sarana legitimasi religius melalui pemilihan lokasi, bentuk arsitektur, dan simbol-simbol keagamaan. Selain itu, makam tokoh agama dan penguasa juga berperan sebagai media representasi status sosial, legitimasi spiritual, dan kesinambungan kekuasaan, yang tercermin dalam penempatan makam, bentuk nisan, inskripsi keagamaan, serta berkembangnya praktik ziarah (Haris, 2014).

Kajian terhadap hubungan antara masjid, makam, dan kekuasaan menjadi penting untuk memahami bagaimana Islam diinstitusionalisasikan sebagai sistem kepercayaan sekaligus dasar legitimasi politik. Tinggalan arkeologis tersebut merekam proses perwujudan nilai-nilai keagamaan dalam bentuk material yang membangun otoritas di tengah masyarakat. Oleh karena itu, tulisan ini berfokus pada kajian arkeologi Islam terhadap masjid dan makam sebagai simbol otoritas politik dan keagamaan, dengan pendekatan historis dan analisis deskriptif terhadap data arkeologis dan literatur terkait, khususnya dalam konteks Nusantara

Kajian arkeologi Islam memandang masjid dan makam sebagai tinggalan material yang merekam dinamika sosial, keagamaan, dan politik masyarakat Muslim masa lalu. Dalam perspektif ini, bangunan keagamaan tidak hanya dipahami sebagai objek religius, tetapi juga sebagai representasi ideologi dan kekuasaan yang dilembagakan secara material. Masjid memiliki fungsi multidimensional yang melampaui perannya sebagai tempat ibadah, yakni sebagai pusat pendidikan, musyawarah, dan administrasi yang berkelindan erat dengan otoritas politik penguasa (Alauddin, 2023). Tata ruang masjid, keberadaan mimbar, serta inskripsi keagamaan menjadi medium visual dan simbolik yang menegaskan legitimasi kepemimpinan politik berbasis nilai-nilai Islam.

Selain masjid, makam tokoh agama dan penguasa juga memegang peranan penting sebagai simbol legitimasi spiritual dan kesinambungan kekuasaan. Bentuk bangunan makam, tipologi nisan, serta praktik ziarah mencerminkan status sosial dan peran politik individu yang dimakamkan, sekaligus membangun memori kolektif masyarakat. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa masjid dan makam memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam membangun struktur kekuasaan Islam, di mana masjid merepresentasikan legitimasi kekuasaan yang bersifat aktif, sementara makam berperan sebagai legitimasi pasca-kematian. Dalam konteks Nusantara, relasi ini memperlihatkan proses adaptasi Islam ke dalam struktur sosial lokal tanpa menghilangkan fungsinya sebagai sumber legitimasi ideologis penguasa.

Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode sejarah dengan pendekatan kualitatif-deskriptif untuk mengkaji hubungan antara masjid, makam, dan kekuasaan dalam konteks arkeologi Islam. Metode sejarah dipilih karena penelitian ini berupaya merekonstruksi dinamika otoritas politik dan keagamaan Islam melalui tinggalan material masa lampau, yang mencakup bangunan masjid, kompleks makam, serta elemen arsitektural dan inskripsi yang menyertainya. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami makna simbolik dan fungsi sosial dari tinggalan arkeologis dalam konteks sejarah dan budaya masyarakat Muslim (Sukmana, 2021).

Tahap analisis data dilakukan dengan cara mengklasifikasikan temuan berdasarkan jenis tinggalan, fungsi, dan konteks historisnya. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik fisik masjid dan makam, sementara analisis interpretatif diterapkan untuk menafsirkan hubungan antara unsur arsitektural dan simbol keagamaan dengan otoritas politik yang melatarbelakanginya. Melalui tahapan metodologis ini, penulisan ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Pembahasan

Pembahasan dalam kajian ini diarahkan untuk melihat bagaimana masjid dan makam, sebagai tinggalan material Islam, berfungsi tidak hanya dalam ranah religius, tetapi juga dalam konteks sosial dan politik. Dalam perspektif arkeologi Islam, tinggalan material dipahami sebagai representasi konkret dari ideologi, relasi kekuasaan, serta praktik keagamaan yang berkembang dalam masyarakat Muslim pada periode tertentu. Oleh karena itu, analisis terhadap masjid dan makam tidak dapat dilepaskan dari konteks historis dan simbolik yang melingkupinya, karena keduanya merupakan medium penting dalam pembentukan dan legitimasi otoritas keagamaan serta kekuasaan politik.



Gambar 1. Visualisasi Masjid dan Makam di Kawasan Masjid Raya Al-Osmani Medan(Sumber: pinterest).

Melalui pemahaman arkeologis dan historis, masjid dan makam dapat dipahami sebagai teks material yang menyimpan pesan-pesan ideologis tentang relasi antara agama dan kekuasaan. Masjid merepresentasikan otoritas yang bersifat aktif dan institusional melalui praktik ibadah dan aktivitas sosial yang berlangsung di dalamnya, sementara makam mencerminkan legitimasi spiritual yang bersifat simbolik dan berkelanjutan melalui memori kolektif dan tradisi ziarah. Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, pembahasan berikut akan menguraikan secara sistematis peran masjid, makam, praktik ziarah, serta relasi di antara keduanya dalam membangun dan mereproduksi ideologi kekuasaan Islam.

1. Masjid sebagai Pusat Otoritas Keagamaan dan Politik

Masjid merupakan salah satu tinggalan arkeologis Islam yang paling signifikan dalam merepresentasikan hubungan antara otoritas keagamaan dan kekuasaan politik. Dalam sejarah Islam, masjid tidak hanya berfungsi sebagai ruang ibadah ritual, tetapi juga sebagai institusi publik yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sejak masa awal Islam, masjid berperan sebagai pusat pendidikan, tempat musyawarah, serta ruang penyampaian kebijakan yang memiliki implikasi sosial dan politik. Dari perspektif arkeologi Islam, fungsi multifungsi ini tercermin melalui lokasi masjid yang umumnya berada di pusat permukiman atau berdekatan dengan pusat kekuasaan, seperti istana atau kediaman penguasa.



Gambar 2. Visualisasi Masjid Raya Medan (Sumber: pinterest).

Secara arsitektural, masjid menyimpan simbol-simbol otoritas yang sarat makna ideologis. Keberadaan mimbar, misalnya, tidak hanya berfungsi sebagai tempat khatib menyampaikan khutbah, tetapi juga sebagai simbol legitimasi kekuasaan. Dalam tradisi Islam, penyebutan nama penguasa dalam khutbah Jumat merupakan tanda pengakuan terhadap otoritas politik yang sah (Khamdevi & Joel, 2024). Dengan demikian, mimbar menjadi medium material yang menghubungkan kekuasaan duniawi dengan otoritas keagamaan, menjadikan masjid sebagai ruang legitimasi politik yang dilembagakan melalui praktik religius.

Selain mimbar, tata ruang masjid juga mencerminkan struktur kekuasaan yang berlaku dalam masyarakat. Penataan ruang utama, serambi, serta akses masuk ke masjid menunjukkan adanya hierarki sosial yang diakui secara kultural dan religius. Dalam beberapa kasus, ruang tertentu di masjid disediakan bagi elite atau penguasa, menegaskan adanya diferensiasi status dalam ruang sakral. Hal ini menunjukkan bahwa masjid bukanlah ruang yang sepenuhnya egaliter, melainkan ruang sosial yang merefleksikan relasi kuasa yang berlaku dalam masyarakat Muslim pada masanya.

Masjid juga berperan sebagai sarana visualisasi kekuasaan melalui elemen arsitektural dan dekoratif. Penggunaan inskripsi ayat Al-Qur'an, kaligrafi, serta simbol-simbol religius pada dinding dan mihrab berfungsi sebagai pernyataan ideologis bahwa kekuasaan yang beroperasi berada dalam bingkai nilai-nilai Islam (Yahya, 2000). Dalam konteks ini, arsitektur masjid tidak hanya berfungsi

estetis, tetapi juga sebagai media komunikasi simbolik yang menegaskan identitas religius penguasa dan legitimasi kekuasaannya di hadapan masyarakat.

Pembangunan masjid oleh penguasa dapat dipahami sebagai strategi politik untuk memperkuat otoritas keagamaan dan sosial. Pendanaan, pemeliharaan, serta penamaan masjid sering kali dikaitkan dengan nama penguasa atau dinasti tertentu, yang secara simbolik mengaitkan kekuasaan politik dengan kesalehan religius (Hidayatulloh, 2020). Dalam perspektif arkeologi Islam, masjid dengan demikian menjadi monumen kekuasaan yang hidup, di mana praktik ibadah sehari-hari secara tidak langsung mereproduksi legitimasi politik penguasa yang melindungi dan mengayomi institusi keagamaan tersebut.

2. Makam sebagai Simbol Legitimasi Spiritual dan Kekuasaan

Makam merupakan tinggalan arkeologis Islam yang memiliki peran penting dalam merepresentasikan legitimasi spiritual dan kekuasaan politik. Dalam kajian arkeologi Islam, makam tidak hanya dipahami sebagai tempat pemakaman, tetapi juga sebagai medium simbolik yang mencerminkan status sosial, otoritas keagamaan, dan peran historis tokoh yang dimakamkan. Keberadaan makam tokoh agama dan penguasa menjadi bukti material bagaimana kekuasaan direpresentasikan dan diwariskan melalui simbol-simbol religius yang bersifat permanen.



Gambar 3. Visualisasi Makam Sultan Iskandar Muda (Sumber: Tripadvisor).

Bentuk fisik makam, seperti ukuran bangunan, struktur pelindung, dan tipologi nisan, menunjukkan adanya diferensiasi status dalam masyarakat Islam masa lalu. Makam penguasa dan ulama umumnya dibangun lebih monumental dibandingkan makam masyarakat biasa, mencerminkan kedudukan sosial dan peran politik yang dimilikinya (Inagurasi, 2017). Dalam perspektif arkeologi, monumentalitas makam merupakan bentuk komunikasi visual yang menegaskan kewibawaan dan legitimasi tokoh yang dimakamkan. Hal ini menunjukkan bahwa kematian tidak menghapus otoritas, melainkan justru menjadi sarana untuk mengukuhkan citra kekuasaan secara simbolik.

Inskripsi keagamaan yang tertera pada makam memainkan peran penting dalam membangun legitimasi spiritual. Tulisan berupa ayat Al-Qur'an, doa keselamatan, serta gelar

kehormatan religius dan politik memperlihatkan upaya untuk mengaitkan tokoh yang dimakamkan dengan nilai-nilai kesalehan dan ketaatan terhadap ajaran Islam. Penyematan gelar-gelar religius pada nisan berfungsi sebagai pernyataan ideologis bahwa kekuasaan yang pernah dijalankan memiliki landasan spiritual yang sah. Dengan demikian, makam menjadi media legitimasi religius yang menghubungkan kekuasaan duniawi dengan otoritas ilahi.

Penempatan makam juga memiliki makna politis yang penting. Makam tokoh penguasa dan ulama sering kali ditempatkan di lokasi strategis, seperti dekat pusat permukiman, masjid, atau kawasan keraton. Penempatan ini menunjukkan bahwa makam tidak dipisahkan dari kehidupan sosial masyarakat, melainkan menjadi bagian dari ruang publik yang memiliki fungsi simbolik. Dalam konteks ini, makam berperan sebagai penanda teritorial dan identitas, yang mengingatkan masyarakat akan keberadaan tokoh berpengaruh serta nilai-nilai yang diwariskannya.

Makam berfungsi sebagai sarana pembentukan memori kolektif yang berkelanjutan. Melalui ritual penghormatan dan tradisi ziarah, makam menjadi ruang sakral yang terus menghidupkan otoritas tokoh yang dimakamkan. Praktik ini memperlihatkan bahwa legitimasi kekuasaan tidak hanya dibangun selama tokoh tersebut hidup, tetapi juga direproduksi setelah kematiannya (Siswanto, 2017). Dalam hal ini, makam menjadi instrumen kultural yang efektif dalam menjaga kesinambungan pengaruh politik dan keagamaan suatu dinasti atau kelompok elite.

3. Praktik Ziarah dan Pembentukan Otoritas Sosial Keagamaan

Praktik ziarah terhadap makam tokoh agama dan penguasa merupakan fenomena penting dalam masyarakat Islam yang memiliki implikasi sosial, keagamaan, dan politik. Dalam perspektif arkeologi Islam, ziarah tidak hanya dipahami sebagai aktivitas religius individual, tetapi juga sebagai praktik sosial yang membentuk dan mempertahankan otoritas keagamaan dalam ruang publik (Ma'rufah, 2017). Keberadaan makam yang terus diziarahi menunjukkan bahwa otoritas seorang tokoh tidak berhenti pada masa hidupnya, melainkan berlanjut dan direproduksi melalui ingatan kolektif masyarakat.

Secara material, intensitas praktik ziarah dapat dibaca melalui perkembangan fisik kompleks makam. Perluasan area makam, pembangunan bangunan pendukung seperti cungkup, gapura, dan tempat persinggahan peziarah, menunjukkan bahwa makam memiliki fungsi sosial yang terus berkembang. Dalam konteks arkeologi, perubahan dan penambahan struktur tersebut menjadi indikator kuat bahwa makam berperan sebagai pusat aktivitas keagamaan yang hidup. Hal ini memperlihatkan bagaimana ruang makam bertransformasi dari tempat pemakaman menjadi ruang sakral yang memiliki pengaruh sosial luas.



Gambar 4. Visualisasi Ziarah di Makam Sultan Iskandar Muda (Sumber: antaranews.com).

Ziarah juga berperan dalam pembentukan otoritas sosial tokoh yang dimakamkan. Melalui ritual doa, tawassul, dan penghormatan, masyarakat membangun persepsi bahwa tokoh tersebut memiliki kedudukan spiritual yang istimewa. Otoritas keagamaan yang lahir dari praktik ziarah ini sering kali melampaui struktur kekuasaan formal, karena bersumber dari legitimasi kultural dan kepercayaan masyarakat. Dalam hal ini, makam menjadi pusat produksi otoritas simbolik yang tidak bergantung sepenuhnya pada institusi politik.

Dari sisi kekuasaan, praktik ziarah memiliki dimensi politik yang tidak dapat diabaikan. Makam tokoh penguasa atau ulama sering kali dimanfaatkan oleh elite tertentu untuk memperkuat legitimasi sosial dan politik. Pengelolaan situs ziarah, penentuan narasi sejarah tokoh yang dimakamkan, serta pengaturan ritual ziarah menjadi sarana kontrol simbolik terhadap ingatan kolektif masyarakat. Dengan demikian, ziarah berfungsi sebagai medium yang menghubungkan kekuasaan spiritual dengan kepentingan sosial-politik yang lebih luas.

Dalam konteks Nusantara, praktik ziarah terhadap makam wali, ulama, dan sultan menunjukkan bagaimana Islam berakar kuat dalam budaya lokal. Tradisi ziarah tidak hanya memperkuat identitas keagamaan, tetapi juga menciptakan jaringan sosial yang menghubungkan berbagai lapisan masyarakat. Melalui ziarah, nilai-nilai keagamaan ditransmisikan secara berkelanjutan, sekaligus memperkuat posisi tokoh-tokoh tertentu sebagai figur sentral dalam struktur sosial (Pinem, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa praktik ziarah merupakan mekanisme penting dalam pembentukan dan pemeliharaan otoritas sosial keagamaan.

4. Relasi Masjid, Makam, dan Ideologi Kekuasaan Islam

Masjid dan makam merupakan dua bentuk tinggalan arkeologis Islam yang memiliki fungsi berbeda namun saling melengkapi dalam membangun ideologi kekuasaan. Dalam perspektif arkeologi Islam, keduanya dapat dipahami sebagai media material yang merepresentasikan otoritas keagamaan dan politik secara simultan. Masjid berfungsi sebagai pusat legitimasi kekuasaan yang bersifat aktif dan operasional dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, sementara makam berperan sebagai simbol legitimasi spiritual yang bersifat jangka panjang dan berkelanjutan. Relasi antara keduanya membentuk lanskap religius-politik yang memperlihatkan bagaimana Islam diinstitusionalisasikan dalam struktur kekuasaan.



Gambar 5. Visualisasi Masjid Azizi (Sumber: pinterest).

Masjid menjadi ruang utama tempat otoritas politik dan keagamaan dipraktikkan secara langsung. Melalui khutbah, pendidikan agama, dan aktivitas sosial, masjid menjadi sarana penyebaran ideologi yang menegaskan peran penguasa sebagai pemimpin umat sekaligus pelindung agama (Fadhly, 2018). Sementara itu, makam berfungsi sebagai ruang simbolik yang memperkuat legitimasi tersebut melalui penghormatan terhadap tokoh-tokoh yang dianggap suci, saleh, atau berjasa dalam sejarah Islam. Dengan demikian, masjid dan makam bekerja dalam dua ranah yang berbeda namun saling menguatkan: yang satu bersifat normatif dan institusional, yang lain bersifat simbolik dan kultural.

Dalam konteks kekuasaan, relasi antara masjid dan makam menunjukkan adanya strategi ideologis yang terstruktur. Penguasa tidak hanya membangun masjid sebagai pusat aktivitas keagamaan, tetapi juga mengaitkannya dengan makam leluhur atau tokoh agama untuk memperkuat narasi kesalehan dan legitimasi historis. Penempatan makam di sekitar masjid atau dalam satu kawasan tertentu menciptakan ruang sakral terpadu yang memadukan praktik ibadah, memori kolektif, dan simbol kekuasaan (Octavia & Prijotomo, 2018). Strategi ini memperlihatkan bagaimana ruang keagamaan dimanfaatkan untuk menanamkan ideologi kekuasaan secara halus namun efektif. Relasi tersebut juga memperlihatkan bahwa kekuasaan dalam masyarakat Islam tidak hanya bergantung pada kekuatan politik atau militer, tetapi juga pada kemampuan mengelola simbol-simbol keagamaan. Masjid dan makam menjadi instrumen penting dalam membangun otoritas simbolik yang diterima secara luas oleh masyarakat. Melalui ritual ibadah di masjid dan praktik ziarah di makam, masyarakat secara tidak langsung terlibat dalam proses reproduksi ideologi kekuasaan yang dilegitimasi oleh agama.

Dalam konteks Nusantara, relasi masjid dan makam menunjukkan karakter Islam yang adaptif dan kontekstual. Islam tidak hadir sebagai kekuatan yang memutus tradisi lokal, melainkan memanfaatkan ruang-ruang sakral untuk membangun legitimasi secara kultural. Masjid dan makam menjadi bukti material bagaimana ideologi kekuasaan Islam diwujudkan dalam bentuk yang dapat diterima oleh masyarakat lokal. Pendekatan arkeologi Islam memungkinkan pembacaan yang lebih

mendalam terhadap relasi ini dengan menempatkan masjid dan makam sebagai teks material yang mencerminkan dinamika kekuasaan dan otoritas keagamaan dalam sejarah Islam.

Relasi antara masjid, makam, dan ideologi kekuasaan menegaskan bahwa agama dan politik dalam masyarakat Islam terjalin secara erat dan saling mempengaruhi. Masjid dan makam tidak hanya menjadi simbol religius, tetapi juga media strategis dalam pembentukan, pemeliharaan, dan pewarisan kekuasaan. Kajian arkeologi Islam memberikan landasan analitis yang kuat untuk memahami bagaimana ruang sakral dimanfaatkan sebagai sarana legitimasi kekuasaan dalam sejarah Islam.

Kesimpulan

Kajian ini menunjukkan bahwa masjid dan makam merupakan tinggalan arkeologis Islam yang memiliki fungsi lebih luas daripada sekadar ruang ibadah dan pemakaman. Melalui pendekatan arkeologi Islam, masjid dapat dipahami sebagai pusat otoritas keagamaan yang sekaligus berperan sebagai instrumen legitimasi politik. Tata ruang, elemen arsitektural, serta praktik keagamaan yang berlangsung di dalamnya mencerminkan bagaimana kekuasaan politik dilembagakan dan disahkan melalui simbol-simbol religius yang bersifat material dan visual.

Makam tokoh agama dan penguasa berfungsi sebagai simbol legitimasi spiritual yang bersifat jangka panjang. Bentuk makam, inskripsi keagamaan, serta praktik ziarah menunjukkan bahwa otoritas tidak berhenti pada masa hidup tokoh tersebut, melainkan terus direproduksi melalui memori kolektif masyarakat. Praktik ziarah memperkuat otoritas simbolik tokoh yang dimakamkan dan menjadikan makam sebagai ruang sakral yang memiliki pengaruh sosial dan keagamaan yang berkelanjutan.

Relasi antara masjid dan makam memperlihatkan keterkaitan erat antara agama dan kekuasaan dalam masyarakat Islam. Masjid merepresentasikan otoritas yang bersifat aktif dan institusional, sementara makam berperan sebagai media legitimasi simbolik dan kultural. Keduanya membentuk lanskap religius-politik yang terintegrasi, di mana ruang sakral dimanfaatkan untuk membangun, mempertahankan, dan mewariskan ideologi kekuasaan. Dengan demikian, pendekatan arkeologi Islam memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika otoritas politik dan keagamaan melalui analisis tinggalan material yang autentik dan kontekstual.

Referensi

- Alauddin. (2023). Ilmu Pendidikan Islam Pendekatan Arkelogis: Prasasti, Situs-Situs Peradaban Islam. *Jurnal Ikhtibar Nusantara*, 2(333), 104–127.
- Fadhly, F. (2018). *Pemahaman Keagamaan Islam di Asia Tenggara Abad XIII-XX*. 18(1), 51–78.
- Haris, T. (2014). Epigrafi Islam : Telusuran Sejak Orde Baru Hingga Kini. *Jurnal Lektur Keagamaan*,

12(1), 1–32.

Hidayatulloh, H. (2020). Perkembangan Arsitektur Islam: Mengenal Bentuk Arsitektur Islam di Nusantara. *Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 13(2), 15–33.

Inagurasi, L. H. (2017). *Ragam Hias Batu Nisan Tipe Aceh Pada Makam-makam Kuna Di Indonesia Abad Ke 13-17*. 26, 37–52.

Khamdevi, M., & Joel, D. B. (2024). *Tinjauan Literatur Sisematis Tentang Arsitektur Nusantara: Definisi, Posisi, dan Persepsi Audiens Ilmiah*. 11(2).

Ma'rufah, T. (2017). *Cultural Symbol dan Politik Identitas dalam Pembangunan Kota Sampit*. 4(2).
<https://doi.org/10.22515/dinika.v4i2.2081>

Octavia, L., & Prijotomo, J. (2018). Arsitektur Nusantara bukan Arsitektur Tradisional maupun Arsitektur Vernakular. *Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia*, 7(94), 167–171.

Pinem, M. (2018). Inskripsi Islam pada Makam-Makam Kuno Barus. *Jurnal Lektur Keagamaan*, 16(81), 17–19. <https://doi.org/10.31291/jlk.v16i1.484>

Siswanto, L. A. (2017). *Arsitektur Makam Siti Fatimah binti Maimun Gresik*. 285–288.

Sukmana, W. J. (2021). *Metode penelitian sejarah*. 1(2), 2–5.

Yahya, A. (2000). *Unsur-unsur Zoomorfik dalam Seni Rupa Islam*. 6(65), 121–131.